

DEMOKRATISASI KONVENSI HAM Relasi Islam dan Negara: Kondisi Indonesia

Abdul Jalil Salam

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: abd_jalil70@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan proses demokratisasi hak asasi manusia. Demokrasi dan hak asasi manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun dalam penelitian ini telah menemukan bahwa selain memberikan sanksi hukum kepada pelaku, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan perkembangan dinamika sosial dan kecenderungan negara-negara lain untuk memahami isu-isu hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis menyarankan paradigma holistik adalah paradigma yang cocok ditawarkan dalam isu-isu hak asasi manusia untuk dikembangkan di Indonesia.

Key words: *Demokratisasi, HAM*

A. Pendahuluan

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di banyak negara. Menurut Jhon Dunn, dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, mengingat hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Demokrasi sebagai dasar kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara.

Pada akhir dasawarsa abad ke-20, demokratisasi menjadi salah satu isu yang paling populer diperbincangkan. Indikasi nyata dari kepopuleran isu tersebut adalah dengan berlipat gandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Negara yang awalnya tidak demokratis, serta merta merubah "kiblat" dan haluannya menjadi demokratis. Seperti lazim diketahui, sejak awal 1980-an banyak negara di kawasan Amerika Latin, Eropa Selatan, Eropa Timur, Afrika, dan Asia mengalami proses transisi demokrasi. Pemerintahan

otoriter yang semula dipraktikkan di kawasan tersebut, sejak akhir 1950-an satu demi satu mulai ditinggalkan.

Meskipun tersendat-sendat, negara semisal Portugal, Brazil, Argentina, Uruguay, Spanyol, Afrika Selatan, Polandia, Hungaria, Taiwan, Yunani, Filipina, Thailand, dan tidak lupa pula Indonesia menyambut proses transisi menuju demokratisasi (transition towards democratization process) dengan antusiasme yang luar biasa. Namun dalam prakteknya, negara-negara penganut sistem demokrasi baru ini (third wave democratization), banyak mengalami hambatan cukup serius dan tak sedikit yang justru semakin terpuruk² dan tertatih-tatih di tengah euforia demokrasi, demokratisasi, dan supremasi HAM.³

Pada era ini, berbagai pihak, termasuk para sarjana hukum ditantang untuk berbuat yang terbaik demi terwujudnya demokratisasi di bidang supremasi HAM. Di masa lalu banyak negara telah berupaya melepaskan diri dari kungkungan hukum kolonial dengan melakukan hal ini. Lalu pertanyaan pokok yang muncul adalah bagaimana dengan negara Indonesia beserta perangkatnya dalam relasi keagamaan melakukan dan meningkatkan (suatu proses) demokratisasi di bidang HAM?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis dengan menggunakan metode deskriptif yuridis analisis berusaha memaparkan data secara ilmiah tentang pandangan tokoh dengan disertai argument mereka. Kemudian akan dilakukan suatu yuridis analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengumpulan data dilakukan secara *library research*, dengan mengamati berbagai konsep dan literatur serta tulisan ilmiah yang berhubungan dengan pokok masalah.

B. Relasi Kekuasaan, Agama dan HAM

Dalam prakteknya, banyak pihak mempertanyakan atau “mungkin” meragukan anggapan bahwa sistem pemerintahan demokrasi yang dianut hampir oleh seluruh negara di dunia dewasa ini mampu menyelesaikan berbagai masalah utama mereka antara relasi kekuasaan dan rakyat.

¹George Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospect in a Changing a World*, (ttp. Westview Press, 1998), 2nd edition, hal. 124. Jeffrey Haynes, *Democracy and Political Change in Third World*, (Routledge: Routledge University Press, 2001), hal. 1-2.

²sistem demokrasi yang diadopsi belum dan tidak membuahkan harapan yang dicita-citakan bahkan menunjukkan gejala sebaliknya. (pen.)

³Lisa Anderson, *Transitions to Democracy*, (Columbia: Columbia University Press, 1999), hal. 16.



Kenyataan ini diungkapkan oleh Robert A. Dahl, dikutip dari Colin Crouch, bahwa demokratisasi semenjak beberapa abad lalu telah mengalami kemandegan.⁴

Dahl dan Colin sangat “menyayangkan” ketika negara-negara Eropa yang notabene adalah penganjur demokrasi, atas nama legalitas demokrasi, justru menindas dan menjajah negara-negara yang jauh sama sekali dari pemahaman tentang ide dan sistem demokrasi, yang secara mayoritas, kebetulan adalah negara-negara Islam.⁵ Kenyataan ini dalam kaca mata Moataz A. Fattah tentu merupakan preseden buruk bagi proses dan transisi menuju demokratisasi. Dimana negara-negara Barat, secara sadar atau tidak, telah menerapkan standar ganda dalam memaknai dan menerapkan demokrasi yang selama ini digembar-gemborkan. Ketika negara-negara dunia ketiga (semisal negara Islam) yang terjajah oleh mereka (Barat) terlepas dari belenggu penjajahan, dan menyerukan serta memperjuangkan demokrasi melalui klaim-klaim universalnya, kesan yang terlihat adalah munculnya perjuangan “demokrasi *vis a vis* demokrasi”⁶

Lebih dari itu, negara-negara penjajah Eropa juga telah menganggap diri mereka sebagai kampium demokrasi, yang siap mengkritik dan “membumihanguskan” segala sistem pemerintahan non demokrasi, serta menjustifikasi bahwa pemerintahan-pemerintahan atau rezim-rezim non demokrasi adalah rezim yang *non-legitimate* dan tidak diakui.⁷

Ali Reza Abootalebi bahkan kurang setuju dengan praktek demokrasi dewasa ini yang pada kenyataannya banyak menyudutkan negara-negara Islam, bahkan menuduh mereka (*Islamic countries*) menghambat transisi demokrasi menuju ke arah demokratisasi. Dalam perspektif mereka, tentu hal ini dianggap wajar, karena demokrasi yang dipahami di Barat pada awal-awal

⁴Robert Alan Dahl, *Democracy and Its Critics*, (Yale: Yale University Press, 1991), hal. 276. Lihat pula Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: yayasan As-Syahidah, 1998), h. 34.

⁵Colin Crouch, Wolfgang Streeck, *The Diversity of Democracy: Corporatism, Social Order, and Political Conflict*, (ttp. Edward Elgar Publishing, 2006), hal. 161. Robert Alan Dahl, *Democracy and Its Critics*, hal. 276. Banding Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, hal. 35.

⁶Lihat Moataz A. Fattah, *Democratic Values in the Muslim World*, ttp. Lynne Rienner Publisher, 2006), hal. 129. A. Watik Pratiknya, dkk., *Pandangan dan Langkah Reformasi*, hal. 223. Banding Robert W. hefner, *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Princeton: Princeton University Press, 2004), hal. 159.

⁷John L. Esposito, John Obert Voll, *Islam and Democracy*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), hal. 39. Lihat A. Watik Pratiknya, dkk., *Pandangan dan Langkah Reformasi*, hal. 223.



kemunculannya, merupakan penolakan terhadap sistem pemerintahan yang menyandarkan legitimasi kekuasaannya pada wahyu Tuhan (khususnya Gereja). Pemahaman ini diperparah dengan pemahaman negara-negara Barat terhadap Islam yang relatif sempit. Islam dipahami hanya sebatas agama ketuhanan, bukan agama kemanusiaan, sehingga kesimpulan “negatif” yang muncul belakangan adalah, penggambaran tentang “Demokrasi yang tidak memiliki pijakan dan relasi sejarah samasekali dengan Islam.”⁸

Padahal, agama dan demokrasi, keduanya diyakini sebagai konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menghadapi kehidupan, baik sebagai makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial. Padahal ada korelasi yang cukup erat antara agama (khususnya Islam) dengan nilai-nilai demokrasi.

Komarudin Hidayat memunculkan tiga model hubungan antara agama dan demokrasi. *Pertama*, model **paradoks** atau negatif, dimana antara agama dan demokrasi tidak bersentuhan sama sekali. Dalam model ini, agama merupakan “ekspresi penderitaan sosial” serta “keluh kesah rakyat” yang tertindas. Sedangkan, demokrasi adalah sistem dunia yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka dan yang mampu menentukan nasib mereka.⁹ *Kedua*, model **sekular**, yang menyatakan bahwa hubungan antara agama dengan demokrasi bersifat netral,

⁸Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: State Society Relation in Developing Countries, 1980-1994*, (Routledge: Routledge University Press, 2000), hal. 14. Bandingkan John L. Esposito, John Obert Voll, *Islam and Democracy*, hal. 17-19. Bandingkan pula Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner, Daniel Brumberg, *Islam and Democracy in Middle East*, (Johns Hopkins: Johns Hopkins University Press, 2003), hal. 62. Dan Shireen Hunter, Huma Malik, *Modernization, Democracy and Islam*, (Washington D.C.: Greenwood Publishing Group, 2005), hal. 133-135.

⁹Menurut pandangan ini, agama tidak sejalan, bahkan berlawanan dengan semangat demokrasi. Para tokoh ataupun penggagas model ini adalah Max Weber, Karl Mark, Nietzsche dan Sartre. Lihat Qomaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi, Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hal. 190-191. Bandingkan dengan Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 88-89. Bandingkan Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: State Society Relation in Developing Countries, 1980-1994*, hal. 16-17.

¹⁰Dalam pandangan ini, peran agama bagi manusia hanya sebatas pada relasi individual manusia dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan. Sedangkan dalam interaksi sosial, nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik dijadikan tata krama dan etika sosial. Lihat Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi, Politik, Budaya dan Ekonomi*, hal. 191. Bandingkan dengan Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner, Daniel Brumberg, *Islam and Budaya dan Ekonomi*, hal. 191. Bandingkan dengan Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner, Daniel Brumberg, *Islam and Democracy in Middle East*, hal. 62. Dan Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Politik*, , hal. 89.



dimana urusan agama, politik, dan demokrasi berjalan sendiri-sendiri atau terpisah.¹⁰ Model kedua ini memandang netral antara agama dan demokrasi dan tidak saling memojokkan. Masyarakat yang mendukung sekularisasi politik tidak harus kangsung dijustifikasi sebagai masyarakat yang anti atau menolak agama.¹¹

Ketiga, model **teo-demokrasi** atau model positif, dimana pandangan ini berpendapat bahwa antara agama dan demokrasi memiliki garis kesesuaian.¹² Hal ini dikarenakan misi profetik agama (diutusny Nabi kepada suatu masyarakat) adalah membawa nilai-nilai pembebasan, keadilan, dan kedamaian sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap sistem pemerintahan despotik, tiranik, otoriter, dan zalim menuju tatanan masyarakat demokratis nan santun.¹³

Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang tak terpisahkan, saling bersinergis. HAM yang merupakan hak dasar manusia mustahil akan terlaksana tanpa adanya dukungan pemerintahan yang demokratis. Hak-hak paling mendasar ini, (the four freedom) telah dinyatakan dalam *Universal Declaration of Human Right*, meliputi kebebasan untuk berbicara, kebebasan menjalankan agama dan beribadah, kebebasan dalam membentuk organisasi, kebebasan untuk hidup dan mendapatkan hidup layak, dan hak-hak lainnya.¹⁴

C. Implementasi Demokrasi dan HAM

Implementasi demokrasi dan HAM sebenarnya cukup mirip. Namun, HAM dalam perspektif pemerintah (penyelenggara negara) berbeda dengan HAM dalam perspektif warga negara. Begitu pula Interpretasi HAM menurut Barat “mungkin” atau bahkan sama sekali tidak sama dengan interpretasi HAM menurut Islam. Begitu pula berlaku pada demokrasi.¹⁵

¹¹Lihat Robert W Hefner, Patricia Horvath, *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, (Hawaii, University of Hawaii Press, 1997), hal. 152. Komaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", hal. 192-193. Lihat pula Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik*, hal. 89.



Dalam pemahaman demikian, HAM dianggap sebagai “kewajiban” pemerintah untuk menghormati dan melaksanakannya. Sedangkan bagi warga negara, HAM merupakan “hak” yang harus dipenuhi oleh pemerintah, institusi ataupun individu lainnya. Ketika seorang warga negara dibebaskan melaksanakan hak-haknya, maka secara implisit pemerintah juga telah melaksanakan “kewajiban” HAM, yang berarti juga melaksanakan “demokrasi”. Itu artinya demokratisasi regulasi HAM telah terwujud.¹⁶

Kewajiban melaksanakan HAM (yang bermakna, aplikasi demokratisasi) bagi pemerintah memang tidak mudah. Wajar bila dalam realitanya, ada semacam kecenderungan umum para penguasa, untuk “mengebiri” hak-hak rakyatnya. Setidaknya ada dua kesulitan dalam melaksanakan “kewajiban” HAM tersebut.¹⁷

Pertama, faktor **internal**, yakni tiadanya keinginan tulus pemerintah menghormati HAM. Biasanya dipicu oleh otoriterisme pemerintahan atau rezim untuk tetap bertahan dalam kekuasaannya. Dengan mentalitas otoriter, bergantinya suatu rezim, bukan sebuah jaminan akan terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Pemerintahan demikian bahkan bisa menjadi penguasa yang lebih otoriter lagi. Di dalam rezim otoriter, pertimbangan hak-hak asasi rakyat otomatis akan terabaikan. Karena, yang ada hanyalah logika kekuasaan, bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya. Hegemoni kekuasaan lebih memainkan perannya dalam menentukan suatu kebijakan.

Bahkan kalau mengikuti teori Machiavelli, jelas-jelas hak asasi manusia akan terabaikan dan “terjerembab”. Sebab bagi Maciavelli, seorang penguasa sah-sah saja menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya. Begitu juga dengan Karl Mark, sebagaimana dikutip Jhon Rogers, yang menganalisa dan melihat kelanggengan kekuasaan dari sudut (kaca mata) ekonomi, bahkan menurutnya, kalau penguasa berniat ingin

¹²Menurut model ketiga ini, agama, baik secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Komarudin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", hal. 194. Lihat pula Robert W Hefner, Patricia Horvatih, *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, hal. 154-155.

¹³Amin Saikal, *Islam and the West: Conflict or Cooperation?*, (Palgrave: Palgrave Macmillan Publishing, 2003), hal. 83. Dan Komarudin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi", hal. 195.



sekali berkuasa lebih lama, cara yang tepat adalah dengan menguasai (“memonopoli”) sumber-sumber ekonomi rakyat.¹⁸

Kedua, faktor **eksternal**, adanya berbagai masalah serta kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan warga negara, sehingga pemerintah kesulitan melaksanakan kewajiban HAM. Termasuk dalam faktor ini munculnya keinginan pemerintah (biasanya muncul pada negara berkembang)—walau pemerintahan demokratis sekalipun—untuk menolak setiap pemaksaan pemberlakuan HAM, dengan alasan bahwa implementasi HAM antara negara satu dengan lainnya cukup relatif dan interpretatif. Keengganan suatu negara berkembang untuk melaksanakan HAM biasanya dikaitkan dengan “iming-iming” bantuan asing, disebabkan karena para negara donor umumnya menerapkan/menawarkan standar ganda: mereka berkehendak agar pelanggaran-pelanggaran HAM di negara yang dibantunya dapat diselesaikan dengan cepat, sementara di dalam negerinya sendiri pelanggaran HAM dibiarkan, dan bahkan tidak mampu mengatasinya.¹⁹

Jika membuka catatan-catatan sejarah, jelaslah bahwa perjuangan demokratisasi hak-hak asasi manusia telah berlangsung sejak abad ke-17. John Locke, dikutip oleh Christopher W. Morris, pernah mengatakan, bahwa saat memasuki masyarakat sipil (Civil Society), berdasarkan teori kontrak sosial, yang harusnya dilakukan pemerintah dalam bernegara hanyalah semata untuk menegakan hak-hak ini. Kegagalan negara untuk mendemokratiskan hak-hak tersebut berkonsekuensi melempangkan munculnya “hak” rakyat untuk mengadakan revolusi.²⁰

¹⁴Lihat Komnas HAM, *Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: UNIC, t.t), hal. 5. Lihat pula H. Arohman Prayitno, Bambang Seodoro Mintargo, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2003), hal. 243. Eva Herman, *Human Rights and Democracy*, (Ashgate; Ashgate University Press, 2005), hal. 1. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornel: Cornel University Press, 2003), hal. 202. E.M. Barendt, *Freedom of Speech*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 2nd Edition, hal. 1. Paul A. Marshall, *Religious Freedom in the World*, (Rowman and Littlefield Publisher, 2007), hal. 1. Annie Payson Call, *The Freedom of Life*, (Kessinger: Kessinger Publisher, 2004), hal. 1. Luke Clements, Janet Read, *Disabled People and the Right to Life: The Protection and Violation of Disabled People's Most Basic Human Rights*, (Routledge: Routledge University Press, 2008), hal. 1.

¹⁵Helena Catt, *Democracy in Practice*, (Routledge: Routledge University Press, 1999), hal. 104. United Nation, *Good Governance Practices for The Protection of Human Rights*, (US: United Nation Publications, 2007), hal. 1. Henry J.Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 3rd revision, hal. 102. Hasbullah M. Afif, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, (Lamongan: Unisda Lamongan dan Pustaka Pelajar, 2005), hal. 74. Lihat pula David Held, *Models of Democracy*, (Stanford: Stanford University Press, 2006), 3rd Edition, hal. 7.

Pemikiran liberal John Locke cukup mempengaruhi dunia Barat pada akhir abad ke 18 dan awal abad ke 19 bersamaan munculnya Revolusi Inggris pada tahun 1688 yang “menelurkan” *Bill Of Rights*, yang telah memberikan dasar pemikiran bagi timbulnya gelombang agitasi revolusioner di tubuh Amerika Utara dan Prancis.²¹

Gagasan tentang hak-hak asasi manusia naluri berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (natural right), yang acap dihubungkan dengan konsep hukum alam (natural law). Namun dalam skema yang lebih kongkrit, demokratisasi HAM baru dimulai sejak dicantumkannya dalam *declaration of independence of America* pada tahun 1776. Hak-hak ini diproklamirkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga negara (*declaration des droits de l'Homme et du Citoyen*) Perancis pada tahun 1789, yang terkenal dengan slogan populernya: *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan). Selanjutnya, pasca perang dunia II, momentum gagasan HAM mencapai legitimasi yuridis dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948, yang didukung oleh sebagian besar anggota negara PBB.²²

D. HAM Perspektif Indonesia

¹⁶Julie Mertus, Jeffrey W. Helsing, *Human Right and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law, and Peace Building*, (US: Institute of Peace Press, 2006), hal. 177. Hasbullah M. Afif, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, hal. 74. Lihat pula Thomas Risse-Kappen, Steve C. Ropp, Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hal. 192.

¹⁷Noam Chomsky, *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, (ttp. Hendry Holt and Cooperation, 2007), hal. 1-2. Larry Jay Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, (US: Times Book Company, 2008). hal. 165. Mansour Fakih dkk., *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, (Yogyakarta: Issist Press, 2003), hal. 92.

¹⁸Niccolo Macchiavelli, Henry Neville, *The Art of War*, (Dover: Dover Publications, 2006), hal. 3-5. Jack Mahoney, Jhon Mahoney, *The Challenge of Human Rights: The Origins, Development, and Significance*, (Wiley: Wiley Blackwell, 2007), hal. 3. Saleh Afshaf, Raja Juli Antoni, *Living Together in Plural Societies: Pengalaman Indonesia-Inggris*, (Yogyakarta: Penerbit Pemuda Muhammadiyah, 2002), hal. 243. David Jefferess, *Post-Colonial Resistance: Culture, Liberation, and Transformation*, (Toronto: University of Toronto Press, 2008), hal. 122. Banding Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: YAPI, 1998) hal. 11. dan Jhon Rogers Commons, *Legal Foundations of Capitalism*, (Europe: The Lawbook Exchange Publisher, 2006), hal. 2.

¹⁹Jack Mahoney, Jhon Mahoney, *The Challenge of Human Rights: The Origins, Development, and Significance*, hal. 3. Thomas Risse-Kappen, Steve C. Ropp, Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, hal. 192. Banding Steve Yui-Sang Tsang, *Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism*, (Greenwood Publishing Group, 2007), hal. 60.

Dalam konteks Indonesia, pembicaraan intens tentang HAM sejatinya baru saja hadir dan menggeliat bersamaan dengan *trend* global dan “kesadaran kolektif dunia” ciptaan Barat.²³ Sementara, fakta lain implementasi HAM dan demokratisasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai yang dihormati. Sehingga makin ranculah hakikat dari substansi HAM itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, seringkali dalam praktek kehidupan politik Indonesia terjadi manipulasi demokrasi, dimana demokrasi hanyalah jargon milik para elit politik dan penguasa untuk mempertahankan status *quo*. Menurut Anas, wajar apabila upaya menuju demokratisasi Indonesia yang humanis—dengan selogan vitalnya penegakan HAM—seringkali terhadang oleh penafsiran-penafsiran atas kekuasaan, melalui munculnya pengurangan dan pembatasan-pembatasan keleluasaan berpendapat, terlebih lagi bila dikait dan dihadapkan dengan kebijakan pemerintah.²⁴

Untuk mempertahankan eksistensi status *quo* dalam setiap rezim otoriter, pemerintah Indonesia melalui dan meminjam “tangan” aparat keamanan seringkali melakukan tindakan politik represif terhadap para demonstran (penyampai aspirasi) dan masyarakat yang diklaim menentanginya. Kenyataan pelanggaran HAM semakin diperburuk dengan sedikit sekali para pelanggar HAM yang diadili dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan yang sangat mengecewakan, terkuak berbagai persoalan pelanggaran HAM berat yang justru dilakukan pemerintah atau kelompok tertentu dan terkesan didiamkan atau “sengaja” dibiarkan tanpa diproses pro-justicia melalui mekanisme prosedur hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penjunjungan supremasi HAM, versi Todung, telah diletakkan berada di bawah “ketiak” politik pemerintah.²⁵

Kedua, selama ini, persepsi pemerintah Indonesia terhadap penegakan HAM sering dipahami laksana “hibah” negara ketimbang sebagai hasil perjuangan rakyat. Indikasinya

²⁰Christopher W. Morris, *The Social Contract Theories: Critical Essays on Hobbes, Locke, and Rousseau*, (Rowman: Rowman and Littlefield, 1999), hal. 6-7. Banding Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 12. dan Noam Chomsky, *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, hal. 84. Banding Jack London, *Revolution and Other Essays*, (ttp. NuVision Publication LLC, 2008), hal. 6-7.

²¹Prasetyo, Dossy Iskandar, dan Bernard L. Tanya, *Ilmu Negara: Beberapa Isu Utama*, (Surabaya: Srikandi, Cet. Ke -1, 2005), hal. 87. Lihat pula Frank Miller Turner (ed.), *Reflection on the Revolution in France*, (Yale: Yale University Press, 2003), hal. 50. dan Aaron wilkes, M.W. William, *Renaissance, Revolution and Reformation: Renaissance, Revolution and Reformation Britain 1485-1750*, (ttp.Folens Limited Publisher, 2004), hal. 1-2. Banding Arthur Goldhammer, *Democracy in America*, (US: Library of America Publishing, 2004), hal.

tampak dari masih cukup lazim dipergunakan secara luas terma “penghargaan” dan “perlindungan” HAM. Makna kedua istilah ini, digiring kepada bahwa rakyat tidak ditempatkan sebagai subjek dalam upaya penegakan HAM, tetapi hanya sebagai objek. Sehingga, kemungkinan terjadi pelanggaran HAM terhadap rakyat, baik individual maupun kolektif relatif cenderung terbuka.²⁶

Ketiga, lemahnya konsep HAM, kesadaran pemerintah dan masyarakat, sehingga pelaksanaan HAM dan demokratisasi di Indonesia sangatlah carut-marut dan diwarnai berbagai bentuk pelanggaran bahkan sampai pada tingkat fatal dan memprihatinkan.²⁷

Sulit disangkal bahwa negara Indonesia belum berhasil membuktikan kepada warganya dan dunia internasional betapa hak asasi manusia (HAM) belum mendapat penghargaan yang layak dan terhormat. Ironisnya Marco Bunte dan Andreas Ufen malah menemukan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama Orde Baru dan beberapa kasus pada masa pasca Reformasi merupakan kenyataan yang sulit dipungkiri. Fenomena lokal menunjukkan betapa negara Indonesia belum serius menempatkan HAM di peringkat prioritas utama sebagai prasyarat sebuah proses demokratisasi.²⁸

E. HAM Perspektif Islam

HAM dalam definisi global adalah hak-hak individual yang berkembang dari pemikiran modern Eropa tentang hukum alam. Di Barat hak-hak asasi terus melaju menjadi *institutional-legal standard*. Dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (UDHR) Perserikatan

²²Brian Tierney, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural law, and Church Law 1150-1625*, (Wm.B. Eerdmans Publishing, 2001), hal. 1. Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 43. Cass R. Sunstein, *The Declaration of Independence and The Constitution of the United States of America*, (Georgetown: Georgetown University Press, 2003), hal. 1-5. Lihat pula Th. C. Van Boven, Fons Coomans, *Human Rights from Exclusion to Inclusion; Principles and Practice: An Anthology from the Work of Theo Van Boven*, (Europe: Martinus Nijhoff Publishers, 2000), hal. 39.

²³Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Press, 2003), hal. 188. Banding Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, hal. 11.

Bangsa-Bangsa (PBB), hak-hak ini kemudian menjadi hukum internasional.²⁹ Persoalannya kemudian, bagaimana dengan institusi lain, semisal agama (Islam), yang juga memiliki sistem spesifik tersendiri dalam mengatur hak-hak individu/asasi manusia (umat)?

Bagaimanapun, Islam merupakan sistem budaya yang unik dimana kesatuan kolektif - bukan individu- terletak di pusat pandangan dunianya. Dalam doktrin Islam, individu secara kultural dipahami sebagai satu ranting dari suatu cabang kolektifitas, yaitu *ummah* (komunitas orang beriman),³⁰ yang terealisasi dalam bentuk keniscayaan (al-dharuriyat / necessities). Meski dalam masyarakat Islam dikenal istilah “al-huquq al-insan” yang sering dimaknakan dengan hak (human right), akan tetapi hak-hak tersebut, dalam ajaran Islam, tidak serta merta terwujud tanpa dibarengi adanya pemenuhan kewajiban-kewajiban.³¹ Dengan kata lain, ajaran Islam pada esensinya lebih menekankan kewajiban daripada hak.

Kewajiban yang diperintahkan kepada manusia di bawah petunjuk Ilahi bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu *huquq Allah* (hak-hak Allah) dan *huquq al-ibad* (hak-hak manusia). Hak Allah adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam ritual ibadah spiritual, sedangkan hak-hak manusia merupakan jelmaan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya sekaligus terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.³²

Hak-hak Allah tidak segera bermakna bahwa hak-hak yang dituntut oleh-Nya, karena dinilai bermanfaat bagi-Nya. Tidaklah demikian, karena Allah di atas segala keberhajatan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini saja yang diciptakan Allah, karena jelas sudah bahwa seluruh hak adalah ciptaan Allah sebagai Sang Maha pencipta segala sesuatu. Hak-hak Allah

²⁴Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Majid*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hal. 56. Banding Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, hal. 12. Dan Tim Lopera, *Otonomi Versi Negara: Demokrasi di bawah Bayang-Bayang Otoriterisme*, (Lopera Pustaka Utama Press, 2000), hal. 58.

²⁵Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 111. Banding Waldron, Jeremy, *Theories of Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 1984), hal. 58.

²⁶David Bouchier, Vedi R. Hadiz, *Indonesian Politics and Society*, (Routledge: Routledge University Press, 2003), hal. 291. Najd E. Sabirin, *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: CESDA – LP3ES, 2000), hal. 46. Banding Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, hal. 12-13.

tersebut senantiasa bersinergi dengan hak-hak makhluknya.³³ Dengan kata lain, kedua hak di atas adalah propan dari Allah Swt. Posisi manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak ini di hadapan-Nya. Dengan demikian, jelas bahwa dalam Islam, tanggung jawab apa pun yang dipegang manusia terhadap sesamanya telah mendahului ditetapkan Allah Swt sebagai hak. Konsep HAM yang pada kemunculannya tetap pada Yang Maha Kuasa telah ditransformasikan dengan cukup jelas dan lugas oleh al-Quran dan Sunnah.³⁴

Ada dua macam HAM Islam jika dicermati dari kategori hak-hak manusia. *Pertama*, HAM yang eksistensinya bisa diselenggarakan (governance) oleh suatu negara, dan *kedua*, HAM yang eksistensinya tidak (secara merta) bisa dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada konsep pertanggungjawaban di depan suatu negara. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan akuntabilitas di hadapan Allah SWT adalah sama.³⁵

Aspek khas berikutnya dalam patron HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Walaupun Allah sendiri yang telah menganugerahkan hak-hak ini, Allah pasti tidak akan melaksanakan kekuasaan-Nya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak tersebut di hari akhirat kelak. Bahkan, sebuah negara Islam sekalipun tidak bisa memaafkan hak-hak ini. Negara harus terikat memberi hukuman kepada para pelanggar dan memberi advokasi kepada pihak yang dirugikan, kecuali pihak yang dianiaya telah memaafkan pelakunya.³⁶ Dengan demikian jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah Swt, dia mungkin bisa

²⁷Suryadi A. Rajab, Ismail Hasani, *Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: penerbitan PBHI dan the Asia Foundation, 2002), hal. 16. Banding Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 114. Banding pula Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, hal. 13.

²⁸Marco Bunte, Andreas Ufen, *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (French: Tailor Publisher, 2008), hal. 59-60. Safroeddin Bakar, *Konteks Kenegaraan HAM*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 132. Lihat pula Catatan Komnas HAM dalam websitenya.

²⁹Bassam Tibi, "Syari'ah, HAM dan Hukum Internasional", dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (Ed.), *Dekonstruksi Syariah (II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain* (Terj.), (Yogyakarta: LKiS, 1996), h.85. Banding Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, hal. 127.

diampuni, tetapi tidak demikian kondisinya dalam kasus tidak memenuhi kewajiban terhadap sesamanya.³⁷

Islam jelas tidak hanya mempatenkan akidah dan dogma dasar serta tata-cara beribadah dan rekomendasi moral semata, tetapi secara keseluruhan pola umum kehidupan juga bersifat *permanet*. HAM merupakan bagian syariat yang krusial sekaligus paten, yang tidak boleh diubah-ubah meskipun konsensus seluruh masyarakat atau lebih-lebih regulasi wewenang negara bisa memodifikasi atau membatasinya, apalagi cenderung ke arah berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran. HAM dalam perspektif al-Quran, adalah doktrin sakral yang paling manusiawi.³⁸

Dalam perspektif al-Quran, HAM merupakan pemberian Allah, tidak seorang pun dan tidak ada satu lembaga pun yang dapat mencabut hak-hak ini. Bahkan HAM bisa dikatakan bagian integral dari keimanan. Abul A'la al-Maududi mengatakan bahwa semua orang dan semua pemerintah yang mengklaim diri mereka sebagai muslim harus menerima, mengakui, dan melaksanakan hak-hak ini. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh keamanan dalam hidup, penghormatan terhadap kesucian perempuan, hak memperoleh standar hidup yang dasar, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh keadilan, persamaan manusia dan sebagainya.³⁹

Di samping hak-hak sipil di atas, Hassan Saeed menambahkan tentang hak-hak manusia sebagai warga negara (hak-hak politik), seperti hak memperoleh keamanan bagi jiwa dan harta, memperoleh perlindungan kehormatan, memperoleh kesucian dan keamanan kehidupan pribadi, memperoleh kebebasan perorangan, hak protes terhadap kezaliman, kebebasan menyuarakan

³⁰Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, (Collins: Harper Collins Press, 2004), hal. 160. Banding Robert Spencer, *The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic law Treats Non-Muslims*, (Prometheus Books Publishing, 2005), hal. 13.

³¹Bassam Tibi, "Syari'ah, HAM dan Hukum Internasional", hal. 99. Mitsuo Nakamura, Sharon Siddique, Omar Farouk Bajunid, *Islam and Civil Society in Southeast Asia*, (Institute of Southeast Asia study Press, 2001), hal. 36.

³²Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1, hal. 54. Banding Shireen Hunter, Huma Malik, *Islam and Human Rights: Advancing a U.S.-Muslim Dialogue*, (Center for Strategic and International Studies CSIS, 2005), hal. 33. Banding pula M.A. Muqtedar Khan, *Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspective*, (Lexington: Lexington Book Press, 2006), hal. 96. Dan Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixtieth to the Twenty-First Century*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal. 192.

pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan keyakinan, perlindungan terhadap agama, persamaan di muka hukum dan hak ikut serta (terlibat) dalam urusan-urusan pemerintahan dan negara.⁴⁰

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran tentang kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan solidaritas kemanusiaan, menimbulkan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat Islam untuk menegakkannya. Prinsip-prinsip tersebut menimbulkan suatu iklim hormat-menghormati juga ikut menjaga nilai-nilai kebersamaan, yang merupakan praktek peradaban berdasarkan keagamaan.⁴¹

Prinsip asasi hukum Islam bahwa manusia memiliki hak, dan dalam kondisi tertentu merupakan kewajiban baginya untuk memenuhi hak dan keinginan dasar dirinya, dengan berusaha sekuat mungkin memperoleh keberhasilan dan kebahagiaan tanpa membahayakan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, harus diciptakan suatu ikatan sosial (social cohesion), saling tolong menolong, dan kerjasama produktif antar-umat manusia dalam mencapai tujuan.⁴²

Al-Quran tidak saja memanskrupsi teks-teks hak asasi manusia, yang terdapat di dalamnya, sebagai anjuran dan peringatan semata, tetapi lebih kepada perintah hukum, dimana diwahyukan pula teks-teks hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya, menjamin kebebasan, memperhatikan hak-hak asasi manusia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai pemegang kedaulatan dalam pemerintahan.⁴³

Rakyat berhak mendapat perlindungan atas kehormatan dan jiwa mereka. Kehormatan mereka tidak boleh diusik. Darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Kehidupan pribadi mereka

³³Abdur Rahim, *Principles of Mohammedan Jurisprudence*, (Lahore: t.p., 1958), hal. 201-202. Banding Katerina Dalacoura, *Islam, Liberalism and Human Rights: Implication for International Relations*, (ttp. I.B. Touris Publisher, 2007), 3rd revision, hal. 42.

³⁴Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, (Westview Press, 2006), 4th revision, hal. 167. A.H. Qosmi, *International Encyclopedia of Islam*, (ttp. Gyan Publishing House, 2006), hal. 104. Abdur Rahim, *Principles of Mohammedan Jurisprudence*, hal. 201-202.

³⁵Universitas Islam Indonesia, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Tafsir*, (Yoqyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 350. Mohammad Shujaat, *Social Justice in Islam*, (Anmol Publications Pvt. Ltd, 2004), hal. 119. Lihat pula Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 55. Dan Louay Safi, *Tensions and Traditions in the Muslim World*, (US: University Press of America, 2004), hal. 120.

tidak boleh diintervensi. Dalam banyak hadits, Rasulullah Saw menekankan *urgennnya* memelihara kehormatan dan darah kaum muslim; sampai orasi terakhir di Mina, saat haji Wada', beliau lebih banyak berpesan berkenaan dengan perlindungan hak-hak dimaksud.⁴⁴

Disamping memberikan sanksi hukum kepada para pelanggar HAM, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan perkembangan dinamika sosial masyarakat dan kecenderungan negara-negara lain dalam memahami masalah HAM. Persoalan ini penting dicermati untuk menetapkan solusi apa yang “macth” dengan masyarakat Indonesia dalam problematika HAM, tanpa mengabaikan konsep-konsep HAM yang berkembang di dunia internasional.

Paradigma holistik merupakan paradigma yang cocok ditawarkan dalam persoalan HAM untuk dikembangkan di Indonesia, karena sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Paradigma holistik memasukkan dimensi pengalaman yang *ilahiah*. Karenanya, lebih mudah untuk menggambarkan hubungan antara hak asasi dan agama yang mengacu pada pengalaman manusia. Dalam paradigma ini, keluhuran manusia tidak ditentukan oleh hak-haknya, tetapi didasarkan pada tanggung jawabnya. Alur berpikir ini didasarkan atas stigma bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, karena manusia mempunyai tanggung jawab bersama untuk memelihara seluruh jagad semesta.⁴⁵

³⁶Toto Tohir, H. M. Abdurrahman, *Negara, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam Tataran Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1999), hal. 146. Bassam Tibi, *Islam's Predicament with Modernity: Politics, Religious Reform and Cultural Change*, (Francis, Tailor Publisher, 2009), hal. 341. Banding Daniel E. Price, *Islamic Political Culture, Democracy, and Human Rights: A Comparative Study*, (ttp., Greenwood Publishing Group, 1999), hal. 21.

³⁷Asgharali Engineer, *On Developing Theology of Peace in Islam*, (Sterling Publishers Pvt. Ltd., 2005), hal. 47. Lihat pula Siraj Sait, *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World*, (ttp. Zed Books Publisher, 2006), hal. 203.

³⁸Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Way of life: In the Light of Shirah*, (Sang-e-Meel Publications, 2001), hal. 318. Lihat Pula Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam.*, hal. 57-58. Banding Elizabeth M.Bucar, Barbra Barnett, *Does Human Rights Need God?*, (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005), hal. 99.

³⁹Lihat Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 15-16. Banding Nazila Ghanea, Alan Stephens, Raphael Walden, *Does God Believe in Human Rights: Essays on Religion and Human Rights*, (Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hal. 1. Banding Masykuri Abdillah, “Islam dan Universalisme HAM”, Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel *Islam dan Universalisme HAM*, Puskum HAM IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 12 April 2001, hal. 4.

⁴⁰Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, (Ashgate: Ashgate Publishing Ltd., 2004), hal. 9. Banding Daniel E. Price, *Islamic Political Culture, Democracy and Human Rights: A Comparative Study*, hal. 1-3.

Paradigma holistik juga mengarahkan perbincangan mengenai; kewajiban penguasa terhadap rakyat, yang kaya dan kuat terhadap yang miskin, menderita, dan tidak berdaya. Sementara kewajiban yang lemah dan papa adalah memberdayakan diri dan menuntut partisipasi. Sejalan dengan prinsip ini, hak-hak masyarakat yang tidak mampu, miskin, tertindas dan marginal, harus diprioritaskan untuk diperjuangkan.⁴⁶

Dalam kerangka paradigma holistik, ada tiga prioritas strategis yang seyogyanya ditempuh pemerintah Indonesia dalam mendemokratisasikan hak asasi ini sebagaimana dituturkan David Hollenbach dan Liam Gearon, *Pertama*, kebutuhan kaum miskin lebih harus diprioritaskan ketimbang keinginan kaum kaya. *Kedua*, kebebasan orang-orang tertindas lebih harus dikedepankan dibanding kebebasan orang-orang yang berkuasa. *Ketiga*, partisipasi kelompok-kelompok marginal lebih harus diutamakan daripada melestarikan tata masyarakat yang telah mengesampingkan (mengebiri) mereka.⁴⁷

⁴¹Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought: The Response of the Shi'i and Sunni Muslims to Twentieth Century*, (ttp. I. B. Tauris Publisher, 2005), hal. 131. Lihat pula Ravindra S. Khare, *Perspective on Islamic Law, Justice, and Society*, (Rowman: Rowman and Littlefield Publishing, 1999), hal. 153.

⁴²Lihat Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 18. Banding F. Ernest Johnson, *Religion and World Order – A Series of Addresses and Discussions*, (ttp. READ BOOK Publisher, 2007), hal. 46. Lihat dan Banding pula Roger Boase, *Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*, (Ashgate: Ashgate Publishing Ltd. 2005), hal. 108.

⁴³Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), Cet. Ke-1, hal. 78. Banding Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, *Dynamism in Islamic Activism: Reference Points for Democratization and Human Rights*, (Netherlands.Amsterdam University Press, 2006), hal. 18. Banding juga Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, hal. 100. A. Juraiddi, *Metode al-Quran dalam Membebaskan Perbudakan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988),hal. 25.

⁴⁴Rasulullah SAW berulang-ulang menyebutkan azab keras yang akan ditimpakan kepada penguasa yang merampas hak diri ini. Beliau bersabda: ‘Tidak boleh seseorang berada di suatu tempat yang di situ dipukuli seorang yang teraniaya. Karena laknat Allah turun kepada semua yang menyaksikan peristiwa itu tetapi tidak dapat mencegahnya.’ Lihat Muhammad Zafrullah Khan, *Islam and Human Rights*, hal. 76.

⁴⁵Ross, H. Mcleod, Andrew J., *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, (Institute of Southeast Asian Studies, 2007), hal. 152. A. Watik Pratiknya, dkk., *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 222-223.

⁴⁶Ross, H. Mcleod, Andrew J., *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, hal. 152. A. Watik Pratiknya, dkk., *Pandangan dan Langkah Reformasi*, hal. 223.

⁴⁷Liam Gearon, *Human Rights and Religion*, (Sussex Academic Press, 2002), hal. 176. Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, hal. 13. Lihat pula Eugene Schlossberger, *A Holistic Approach to Rights: Affirmative Action, Reproductive Rights, Censorship, and Future Generations*, (US: University Press of America, 2007), hal. 46.

F. Kesimpulan

Dari segi konstitusi, melalui Undang-undang Dasar 1945, Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat untuk menegakan dan melaksanakan HAM bernuansa holistik, sebagai upaya penghormatan negara terhadap hak-hak rakyat.

Tekad pemerintah Indonesia untuk menegakan HAM juga telah ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Pembentukan Komnas HAM dimaksudkan dalam upaya membantu pengembangan kondisi yang lebih kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komnas HAM dibentuk sesuai dengan keinginan dan konsensus masyarakat internasional pada Konferensi HAM sedunia II di Wina pada tahun 1992 yang secara kolektif mengesahkan Deklarasi dan Program Aksi Wina.

Perlindungan dan demokratisasi aturan hak asasi manusia (HAM), yang di masa Orde Baru diabaikan, berusaha diwujudkan kembali secara serius oleh pemerintahan pasca reformasi. Keseriusan ditunjukkan dengan telah dicanangkannya Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) Indonesia 1998-2003 sebagai *follow up* pembentukan Komisi Nasional HAM pada tahun 1993, dengan empat pilar rumusan konkretnya, yaitu: (1) pengesahan perangkat-perangkat internasional tentang HAM yang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional secara menyeluruh; (2) sosialisasi dan upaya pendidikan HAM; (3) prioritas perlindungan terhadap HAM; (4) upaya aplikasi konvensi-konvensi HAM yang telah disahkan bersama .

DAFTAR PUSTAKA

George Sorensen, *Democracy and Democratization: Processes and Prospect in a Changing a World*, (ttp. Westview Press, 1998), 2nd edition

Jeffrey Haynes, *Democracy and Political Change in Third World*, (Routledge: Routledge University Press, 2001)

Lisa Anderson, *Transitions to Democracy*, (Columbia: Columbia University Press, 1999)
Muladi, *Demokratisasi , Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002)

Laurence Whitehead, *Democratization: Theory and Experience*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 109.

Robert Alan Dahl, *Democracy and Its Critics*, (Yale: Yale University Press, 1991)

Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: yayasan As-Syahidah, 1998)

Colin Crouch, Wolfgang Streeck, *The Diversity of Democracy: Corporatism, Social Order, and Political Conflict*, (ttp. Edward Elgar Publishing, 2006)

Moataz A. Fattah, *Democratic Values in the Muslim World*, ttp. Lynne Rienner Publisher, 2006)

Robert W. Hefner, *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Princeton: Princeton University Press, 2004)

John L. Esposito, John Obert Voll, *Islam and Democracy*, (Oxford: Oxford University Press, 1996)

Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: State Society Relation in Developing Countries, 1980-1994*, (Routledge: Routledge University Press, 2000)

Larry Jay Diamond, Marc F. Plattner, Daniel Brumberg, *Islam and Democracy in Middle East*, (Johns Hopkins: Johns Hopkins University Press, 2003)

Shireen Hunter, Huma Malik, *Modernization, Democracy and Islam*, (Washington D.C.: Greenwood Publishing Group, 2005)

Qomaruddin Hidayat, "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi" dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi, Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: Paramadina, 1994)

Umaruddin Masdar, dkk., *Mengasah Naluri Publik, Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta: LKIS, 1999),

Robert W. Hefner, Patricia Horvatih, *Islam in an Era of Nation-States: Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, (Hawaii, University of Hawaii Press, 1997)

Amin Saikal, *Islam and the West: Conflict or Cooperation?*, (Palgrave: Palgrave Macmillan Publishing, 2003)

Komnas HAM, *Pernyataan Umum Tentang Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: UNIC, t.t)
Arohman Prayitno, Bambang Seodoro Mintargo, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2003)

Eva Herman, *Human Rights and Democracy*, (Ashgate; Ashgate University Press, 2005)

Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Cornel: Cornel University Press, 2003)

E.M. Barendt, *Freedom of Speech*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 2nd Edition
Paul A. Marshall, *Religious Freedom in the World*, (Rowman and Littlefield Publisher, 2007)

Annie Payson Call, *The Freedom of Life*, (Kessinger: Kessinger Publisher, 2004)

Luke Clements, Janet Read, *Disabled People and the Right to Life: The Protection and Violation of Disabled People's Most Basic Human Rights*, (Routledge: Routledge University Press, 2008)

Helena Catt, *Democracy in Practice*, (Routledge: Routledge University Press, 1999)

United Nation, *Good Governance Practices for The Protection of Human Rights*, (US: United Nation Publications, 2007)

Henry J.Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral: Text and Material*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 3rd revision

Hasbullah M. Afif, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis*, (Lamongan: Unisda Lamongan dan Pustaka Pelajar, 2005)

David Held, *Models of Democracy*, (Stanford: Stanford University Press, 2006), 3rd Edition

Julie Mertus, Jeffrey W. Helsing, *Human Right and Conflict: Exploring the Links between Rights, Law, and Peace Building*, (US: Institute of Peace Press, 2006)

Thomas Risse-Kappen, Steve C. Ropp, Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)

Noam Chomsky, *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, (ttp. Hendry Holt and Cooperation, 2007)

Larry Jay Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*, (US: Times Book Company, 2008)

Mansour Fakih dkk., *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan HAM*, (Yogyakarta: Issist Press, 2003)

Niccolo Macchiavelli, henry Nevile, *The Art of War*, (Dover: Dover Publications, 2006)

Jack Mahoney, Jhon Mahoney, *The Challenge of Human Rights: The Origins, Development, and Significance*, (Wiley: Wiley Blackwell, 2007)

Saleh Afshaf, Raja Juli Antoni, *Living Together in Plural Societies: Pengalaman Indonesia-Inggris*, (Yogyakarta: Penerbit Pemuda Muhammadiyah, 2002)

David Jefferess, *Post-Colonial Resistance: Culture, Liberation, and Transformation*, (Toronto: University of Toronto Press, 2008)

Abul A'la al-Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: YAPI, 1998)

Jhon Rogers Commons, *Legal Foundations of Capitalism*, (Europe: The Lawbook Exchange Publisher, 2006)

Steve Yui-Sang Tsang, *Intelligence and Human Rights in the Era of Global Terrorism*, (Greenwood Publishing Group, 2007)

Christopher W. Morris, *The Social Contract Theories: Critical Essays on Hobbes, Locke, and Rousseau*, (Rowman: Rowman and Littlefield, 1999)

Jack London, *Revolution and Other Essays*, (ttp. NuVission Publication LLC, 2008)

Prasetyo, Dossy Iskandar, dan Bernard L. Tanya, *Ilmu Negara: Beberapa Isu Utama*, (Surabaya: Srikandi, Cet. Ke -1, 2005)

Frank Miller Turner (ed.), *Reflection on the Revolution in France*, (Yale: Yale University Press, 2003)

Aaron wilkes, M.W. William, *Renaissance, Revolution and Reformation: Renaissance, Revolution and Reformation Britain 1485-1750*, (ttp.Folens Limited Publisher, 2004)

Arthur Goldhammer, *Democracy in America*, (US: Library of America Publishing, 2004)

Brian Tierniey, *The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural law, and Church Law 1150-1625*, (Wm.B. Eerdmans Publishing, 2001)

Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001)

Cass R. Sunstein, *The Declaration of Independence and The Constitution of the United States of America*, (Georgetown: Georgetown University Press, 2003)

Th. C. Van Boven, Fons Coomans, *Human Rights from Exclusion to Inclusion; Principles and Practice: An Anthology from the Work of Theo Van Boven*, (Europe: Martinus Nijhoff Publishers, 2000)

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Press, 2003)

Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Majid*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004)

Tim Lopera, *Otonomi Versi Negara: Demokrasi di bawah Bayang-Bayang Otoriterisme*, (Lopera Pustaka Utama Press, 2000)

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)

Waldron, Jeremy, *Theories of Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 1984)

David Bourchier, Vedi R. Hadiz, *Indonesian Politics and Society*, (Routledge: Routledge University Press, 2003)

Najd E. Sabirin, *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: CESDA – LP3ES, 2000)

Suryadi A. Rajab, Ismail Hasani, *Indonesia, Hilangnya Rasa Aman: Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: penerbitan PBHI dan the Asia Foundation, 2002)

Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Marco Bunte, Andreas Ufen, *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (French: Tailor Publisher, 2008)

Safroeddin Bakar, *Konteks Kenegaraan HAM*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Bassam Tibi, “Syari’ah, HAM dan Hukum Internasional”, dalam Tore Lindholm dan Kari Vogt (Ed.), *Dekonstruksi Syariah (II); Kritik Konsep, Penjelajahan Lain* (Terj.), (Yogyakarta: LKiS, 1996)

Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, (Collins: Harper Collins Press, 2004)

Robert Spencer, *The Myth of Islamic Tolerance: How Islamic law Treats Non-Muslims*, (Prometheus Books Publishing, 2005)

Mitsuo Nakamura, Sharon Siddique, Omar Farouk Bajunid, *Islam and Civil Society in Southeast Asia*, (Institute of Southeast Asia study Press, 2001)

Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1

Shireen Hunter, Huma Malik, *Islam and Human Rights: Advancing a U.S.-Muslim Dialogue*, (Center for Strategic and International Studies CSIS, 2005)

M.A. Muqtedar Khan, *Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspective*, (Lexington: Lexington Book Press, 2006), hal. 96. Dan Rudolph

Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixtieth to the Twenty-First Century*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

Abdur Rahim, *Principles of Mohammedan Jurisprudence*, (Lahore: t.p., 1958)

Katerina Dalacoura, *Islam, Liberalism and Human Rights: Implication for International Relations*, (ttp. I.B. Touris Publisher, 2007)

Ann Elizabeth Mayer, *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*, (Westview Press, 2006), 4th revision

A.H. Qosmi, *International Encyclopedia of Islam*, (ttp. Gyan Publishing House, 2006)

Universitas Islam Indonesia, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Tafsir*, (Yoqyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2007)

Mohammad Shujaat, *Social Justice in Islam*, (Anmol Publications Pvt. Ltd, 2004)

Louay Safi, *Tensions and Traditions in the Muslim World*, (US: University Press of America, 2004)

Toto Tohir, H. M. Abdurrahman, *Negara, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam Tataran Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1999)

Bassam Tibi, *Islam's Predicament with Modernity: Politics, Religious Reform and Cultural Change*, (Francis, Tailor Publisher, 2009)

Daniel E. Price, *Islamic Political Culture, Democracy, and Human Rights: A Comparative Study*, (ttp., Greenwood Publishing Group, 1999)

Asgharali Engineer, *On Developing Theology of Peace in Islam*, (Sterling Publishers Pvt. Ltd., 2005)

Siraj Sait, *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World*, (ttp. Zed Books Publisher, 2006)

Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Way of life: In the Light of Shirah*, (Sang-e-Meel Publications, 2001)

Elizabeth M.Bucar, Barbra Barnett, *Does Human Rights Need God?*, (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2005)

Nazila Ghanea, Alan Stephens, Raphael Walden, *Does God Believe in Human Rights: Essays on Religion and Human Rights*, (Martinus Nijhoff Publishers, 2007)

Masykuri Abdillah, "Islam dan Universalisme HAM", Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel *Islam dan Universalisme HAM*, Puskum HAM IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 12 April 2001

Hassan Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, (Ashgate: Ashgate Publishing Ltd., 2004)

Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought: The Response of the Syi'i and Sunni Muslims to Twentieth Century*, (ttp. I. B. Tauris Publisher, 2005)

Ravindra S. Khare, *Perspective on Islamic Law, Justice, and Society*, (Rowman: Rowman and Littlefield Publishing, 1999)

F. Ernest Johnson, *Religion and World Order – A Series of Addresses and Discussions*, (ttp. READ BOOK Publisher, 2007)

Roger Boase, *Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*, (Ashgate: Ashgate Publishing Ltd. 2005)

Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, *Dynamism in Islamic Activism: Reference Points for Democratization and Human Rights*, (Netherlands.Amsterdam University Press, 2006)

A. Juraidi, *Metode al-Quran dalam Membebaskan Perbudakan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1988)

Ross, H. Mcleod, Andrew J., *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, (Institute of Southeast Asian Studies, 2007)

A. Watik Pratiknya, dkk., *Pandangan dan Langkah Reformasi B.J. Habibie*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

Liam Gearon, *Human Rights and Religion*, (Sussex Academic Press, 2002)

Eugene Schlossberger, *A Holistic Approach to Rights: Affirmative Action, Reproductive Rights, Censorship, and Future Generations*, (US: University Press of America, 2007)

Dirjen Perlindungan HAM, “*Salinan Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009*”, (Jakarta: Dirjen Perlindungan HAM)

Dirjen Perlindungan HAM, *Keputusan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009*